

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR
NEGERI 58 SEMABAK DI DESA AMBARANG KECAMATAN NGABANG
KABUPATEN LANDAK**

Oleh:

MARETNO^{1*}

NIM. E1012161083

Saherimiko^{2*}, Dhidik Apriyanto^{2*}

*Email: e1012161083@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Public Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Public Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai bentuk perhatian dalam rangka memberikan pemahaman terhadap program kebijakan kurikulum 2013 di SDN 58 Semabak dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan juga sumber daya alam (SDA) khususnya di Desa Ambarang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses dari implementasi kebijakan kurikulum 2013 sekolah dasar negeri 58 semabak desa ambarang kecamatan ngabang kabupaten landak. Kemudian hasil dari penelitian ini penulis menjumpai adanya permasalahan yaitu kurangnya sarana berupa buku perpustakaan dan ruang kelas dalam upaya mendukung penerapan kurikulum 2013 di sekolah dasar 58 semabak. Permasalahan terkait sarana berupa buku perpustakaan dan ruang kelas guna mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam ditentukan oleh penulis karena mengingat terdapat sejumlah masalah dilingkungan sekolah SDN 58 Semabak terkait kebijakan kurikulum 2013 baik itu dari segi kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola kebijakan kurikulum 2013 yang dinilai masih kurang diterapkan dengan maksimal. Adapun upaya penerapan kebijakan kurikulum 2013 ini yang dapat dilakukan oleh SDN 58 Semabak Kabupaten Landak, serta meningkatkan kuantitas SDM maupun SDA produktif masyarakat setempat agar semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Saran dari penulis yaitu Diharapkan pemerintah daerah kabupaten landak juga ikut berperan dalam menjalankan proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 dengan cara memberikan segala fasilitas terkait program kebijakan kurikulum 2013 dan dukungan orang tua siswa.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia ,Program, Implementasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat, kebutuhan pendidikan akan semakin meningkat. Dalam era globalisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara. Kualitas SDM bergantung pada kualitas pendidikan dan peran pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, terbuka dan demokratis. Salah satu dari komponen penting dari sistem pendidikan nasional adalah kurikulum.

Kurikulum menurut UU No.20 Tahun 2003 telah menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional, didalamnya mencakup rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Slameto (Armin Uno, 2011: 2) belajar adalah sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya.

Serangkaian persoalan pendidikan yang masih mengganjal dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah belum adanya sistem pembelajaran yang dinilai untuk menjawab cita-cita pendidikan selama ini, hal ini dibuktikan dengan sederet pergantian Kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun. Kurikulum merupakan bidang yang sulit untuk dipahami, tetapi sangat terbuka untuk didiskusikan. Perubahan kurikulum dalam pendidikan nasional Indonesia tercatat sejak tahun 1945 telah mengalami 10 kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, yang disusul dengan kurikulum terbaru yakni kurikulum 2013.

Perubahan kurikulum bertujuan mengarah pada perbaikan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan perlu dilakukan

karena adanya revitalisasi kurikulum. Kurikulum 2013 muncul sebagai kritikan kurikulum sebelumnya yakni KTSP 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).

Pada saat ini Kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru merupakan pembahasan yang menarik untuk diperbincangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, pada awal tahun ajaran 2013/2014, pemerintah secara resmi telah menerapkan kurikulum 2013 untuk ujucoba di berapa sekolah terakreditasi A dan B, yaitu pada Sekolah Dasar kelas I, II, III, IV, V dan kelas VI, tingkat menengah pertama (SMP/MTS) kelas VII, VIII, dan IX, serta tingkat menengah atas (SMA/MA/SMK) kelas X, XI, dan XII. Pertama secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis dibidang pendidikan.

Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah Pancasila Dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun Tentang

Standar Kompetensi Lulusan Serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi. Yang kedua adalah landasan filosofis, berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa kini, dan kehidupan bangsa yang akan datang. Selanjutnya adalah landasan teoritis, dimana kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pada teori pendidikan dan standar teori pendidikan yang berbasis kompetensi. Dan terakhir adalah landasan empiris, secara kasat mata berapa kurikulum sebelumnya masih terlalu menenankan pada konsep penguasaan teori belaka tanpa disertai praktik yang memadai, sehingga peserta didik terkesan begitu konseptual dalam berperilaku.

Sejak tahun 2013, tercatat 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan barat telah menerapkan kurikulum, yang sudah menerapkan kurikulum 2013 di kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak, hal ini senada dengan ungkapan kepala dinas pendidikan Kalimantan barat mulai menjalankan

kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2013/2014. Dari 12 kabupaten 2 kota yang menerapkan kurikulum 2013, kabupaten Landak termasuk salah satunya. Pada saat hanya beberapa sekolah yang terpilih untuk diterapkan karena beberapa pertimbangan, seperti sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap, kualitas guru yang masih kurang memadai, serta beberapa pertimbangan lain. Hal ini diperjelas oleh salah seorang guru sekolah dasar yang kebetulan mengajar di salah satu sekolah yang terletak di desa Ambarang di Dusun Semabak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Penerapan kurikulum 2013 pada SDN 58 Semabak sudah berjalan selama 3 tahun. Dalam observasi yang oleh peneliti, didapatkan beberapa hasil bahwa, pembelajaran dalam kurikulum 2013 sudah berjalan selama tahun terakhir, namun masih terdapat beberapa kendala seperti ukuran dan tujuan kebijakan kurikulum 2013 yang tergolong cukup ideal dikarenakan ada dua komponen yang ingin dicapai sekaligus, yakni lulusan yang berkarakter dan berkompetensi. Sementara kondisi peserta didik di SDN 58 Semabak belum memenuhi untuk

mencapai dua hal tersebut dalam proses yang bersamaan karena daya tanggap peserta didik masih tergolong lambat dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), sehingga guru harus mengajar secara perlahan dari tiap materi. Dari sumber daya, sarana belajar yang seharusnya masing-masing kelas terdiri dari 1 ruangan, akan tetapi di SDN 58 Semabak hanya terdapat 5 ruang kelas dimana kelas 1 dan kelas 2 digabung menjadi 1 ruangan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu sekolah yang terpilih untuk diterapkan kebijakan tersebut, yakni SDN 58 Semabak, dengan berfokus pada sisi implementasi kebijakan kurikulum 2013.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya sarana berupa buku perpustakaan dan ruang kelas dalam upaya mendukung penerapan kurikulum 2013 di SDN 58 Semabak

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap implementasi kebijakan dari kurikulum 2013 di SDN 58 Semabak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : "Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri 58 Semabak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak"?:

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu berupaya untuk mendeskripsikan hasil implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri 58 Semabak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran intelektual kearah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam

bidang kajian kebijakan. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan akademisi dan memeberikan sumbangan ilmiah terhadap kajian kebijakan Ilmu Administarasi Negara.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kurikulum 2013 dan bisa menjadi solusi pemecahan masalah mengenai implementasi kebijakan kurikulum 2013 Sekolah Dasar di SDN 58 Semabak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Proses Implementasi Kebijakan

Menurut *Charles O' Jones* dalam buku, Implementasi sebagai getting the done "and" doing it. Pengertian tersebut adalah pengertian yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu implementasi kebijaksanaan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Menurut *Charles O' Jones*, Pelaksanaan

menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Oleh karena itu, lebih lanjut Charles O'Jones merumuskan implementasi sebagai “ *a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*”. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumberdaya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan Charles O' Jones tentang implementasi tersebut tidak kurang dari suatu tahap kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit, dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (realisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*)). Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (*routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments*).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka yang perlu mendapatkan perhatian dan persiapan dalam proses implementasi kebijakan interpretasi, organisasi, penyedia resorsis, dan manajemen program, serta penyediaan layanan dan manfaat pada publik. Atas dasar, maka masalah implementasi semangkin lebih jelas dan luas. Implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan –tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Berikut ini operasi mengenai proses implementasi suatu kebijakan publik

yang mencakup tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap aplikasi.

A. Tahapan pengorganisasian (toorganized)

Menurut *Charles O. Jones* dalam Tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya. Penetapan anggaran yang diperlukan dari mana sumbernya, bagaimana menggunakannya dan mempertanggung jawabkan penetapan prasarana dan sarana apa yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan.

B. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksana kebijakan (*policy implementors*) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) dilingkungan pemerintah daerah
2. Sektor Swasta (private sectors)
3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
4. Komponen masyarakat

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melakukan dan siapa saja yang melakukan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

C. Standar Prosedur Operasional

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standard operating procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang diinginkan dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu setiap program yang dibuat prosedur (protap) atau prosedur yang baku standar prosedur operasi dan standar pelayanan minimal (SPM).

D.Sumber daya Keuangan dan Peralatan

Besarnya anggaran melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat dan lain-lain.

E. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih menekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku program untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai leading sector bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

F. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agarkinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dapat dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

2. Tahap interpretasi

Menurut Charles o. Jones dalam Tahapan interpretasi merupakan tahapan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis(*strategic policy*) akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*). Kebijakan umum atau strategis

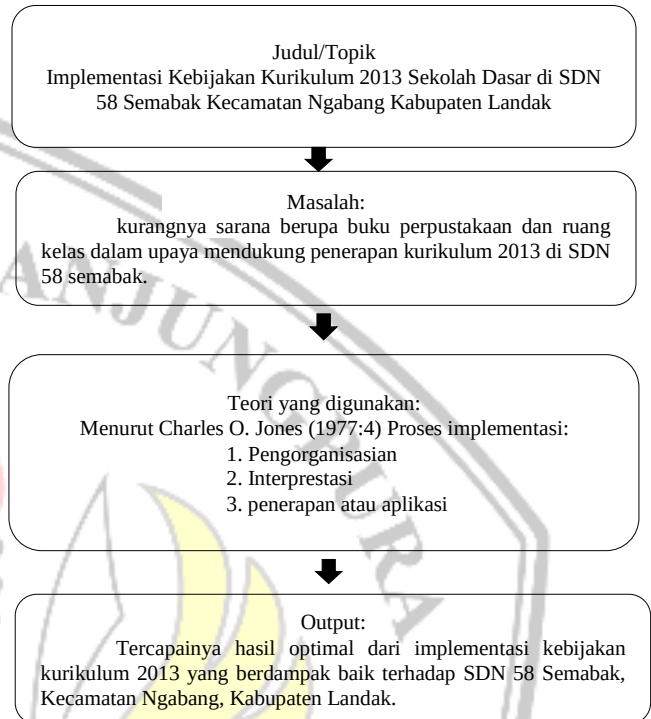
diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama antar lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah).

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi.

3. Aplikasi

Menurut Charles O. Jones dalam Tahapan aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitasnya. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Kerangka Pikir



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2020

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang menekankan proses dari pada hasil penelitian, sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman mendalam tentang sesuatu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada upaya untuk memberikan deskripsi (gambaran) umum secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai bagaimana ”Implementasi kebijakan Kurikulum 2013

Sekolah Dasar di SDN 58 Semabak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak''. Ini merupakan fenomena yang melibatkan proses serta tindakan subjek yang terlibat didalamnya. Subjek tersebut bertindak dengan sejumlah alasan yang mengandung makna-makna tertentu.

Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan/menganalisis proses dan mengungkapkan secara mendalam mengenai Implementasi kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Dasar di SDN 58 Semabak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Jenis penelitian ini menurut John W. Creswell, (Creswell,1994:150-1) metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, karena penelitian ini meneliti Implementasi kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Dasar di SDN 58 Semabak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses implementasi yang bermula dari sebuah kebijakan yang ditetapkan dan memiliki peraturan-peraturan hukum yang sah.

Tahap-tahapan implementasi akan bermula dengan serangkaian kegiatan pengolahan peraturan yang memiliki hukum dan membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumber daya, teknologi, dan menetapkan procedure yang ada dan tahapan Implementasi pada hakikatnya untuk memberikan pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Oleh karena itu, proses implementasi merupakan proses yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan lancar sesuai keinginan, akan ada permasalahan yang akan terjadi dalam pelaksanaannya.

kerena implementasi kebijakan tidak akan dilakukan satu instansi tetapi berkerja sama dengan pihak lain maka permasalahannya yang akan dihadapi pasti juga akan kompleks bagaimana kemampuan implementor kebijakan, hubungan kerjasama antara pelaksana serta

bagaimana kebijakan dapat dapat diterima oleh sasaran kebijakan.

1. Pengorganisasian

Menurut *Charles O Jones* organisasi merupakan perhatian yang paling penting karena dapat dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan, tujuan dari awal ndari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang untuk setiap organisasi harus memiliki struktur tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas, untuk memahami pengorganisasian dalam implementasi kebijakan sebagaimana yang ada didalam UU No.20. Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, kemudiam yang selanjutnya adalah PP No. 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dapat dipahami mengenai pelaksanaan kebijakan proses Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 (K13), Standar operasioanl Prosedur, serta Sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan. Ada berapa berkaitan dengan pengorganisasian yaitu:

1. Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum 2013 Pelaksanaan kebijakan sangatlah penting tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, pentapan kebijakan bukan sekedar penetapan Lembaga mana yang akan melaksanakan dan siapa yang akan melaksanakan. Tetapi juga akan menentukan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tanggung jawab masing-masing pelaksanaan kebijakan tersebut, dengan adanya peraturan mengenai landasan yuridis kurikulum 2013 adalah Pancasila dan undang-undang 1945, undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan menteri Pendidikan nasional nomor 23 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan serta peraturan menteri pendididkan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dalam penetapan pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013.

2. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan,

siapa sasarannya dan hasil apa yang mau dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementor kebijakan Kurikulum 2013 yaitu Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua Siswa, dan Operator Sekolah SDN 58 Semabak. 3. Sumber Daya Keuangan Dan Peralatan meliputi Gedung sekolah dan peralatan sekolah.

3. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada pola kepemimpinan dan kordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan lebih dari satu lembaga pelaku kebijakn maka harus jelas dan tega pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegal atau Lembaga yang ditunjuk sebagai kordinator.

1. Penetapan Jadwal Kegiatan

1. Kinerja pelaksanakn program menjadi baik setidaknya menjadi dimensi Sumber Daya Keuangan

Setelah melakukan siapa yang menjadi pelaku kebijakan SOP perlu ditetapkan besarnya sumber daya keuangan yang akan digunakan serta peralatan apa saja yang

dibutuhkan untuk melaksanakn kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan dalam mengimplentasikan kebijakan tentunya memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik itu sumber daya keuangan maupun sumber daya peralatan untuk menjamin berlangsungnya pelaksanaan kebijakan maka perlu untuk mencukupi anggaran sangat penting anggar dapat berjalan dengan efektif efisien dan cepat dalam mencapai serta mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengetahui sumber daya keuangan yang akan digunakan dalam melaksanakan kebijakan kurikulum 2013.

2. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana atau alat penunjang yang diperlukan untuk implementasi sebuah kebijakan secara optimal perlatan yang diperlukan proses kebijkan, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan.

2. Interpretasi

Sebuah kebijakn tidak mencapai tujuan apabila terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antar

implementor kebijakan maupun sasaran kebijakan pemahaman yang baik merupakan salah satu faktor penentu kebijakan berhasil atau tidak dalam mencapai suatu tujuan.

1. Pemahaman Kebijakan Kurikulum 2013

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada siswa siswi SDN 58 semabk terutama sasaran kebijakan. Ini sulit untuk mencapai tujuan dari kebijakan apabila implementor tidak memahami kebijakan dan tugasnya dengan baik.

3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan yang memegang peran penting dalam implementasi kebijakan dan pemahaman masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, Sosialisasi sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para

pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik dan disosialisasikan dengan baik sering kali terjadi masalah dan sosialisasi yaitu adanya pengertian miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

Tujuan pemberian informasi ini agar kelompok sasaran dapat memahami kebijakan yang akan di implementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah akan tetapi juga berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tujuan kebijakan sosialisasi dapat dilakukan secara langsung dengan cara dilakukannya pertemuan antara implementor kebijakan serta pihak pihak yang terkait yaitu masyarakat dan jajaran pemerintah masyarakat.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah di kemukakan peneliti maka, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dan pembahasan tersebut yaitu:

1. Tahap pengorganisasian dalam proses implementasi kebijakan kurikulum 2013

di desa ambarang kecamatan ngabang kabupaten landak belum efektif dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Dalam pelaksanaan kebijakan kurangnya pembinaan ,pelayanan,dan sosialisasi dari ketiga implementor, yaitu : guru SDN 58 semabak dan siswa SDN 5 semabak.
 - b. Untuk Stsnda Operasional (SOP) sendiri telah adanya SOP yang mengatur tentang waktu prosedur dalam pelaksanaan kebijakan untuk tugas dari masing masing implementor tersebut.
2. Untuk Tahap interpretasi pada proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SDN 58 semabak masih kurang Optimal:
- a. Pemahaman isi dan tujuan tentang ketiga implementor kebijakan kurikulum 2013 sudah memahami tetapi guru belum atau kurang dalam memahami dengan isi dan tujuan tersebut .
 - b. Sosialisasi sudah dilakukan oleh dinas Pendidikan tapi tidak rutin sosialisasi ini dilakukan supaya pelaksanaan dari kebijakan kurikulum 2013 berjalan lancar dengan efektif namun kenyataannya

dilapangan masih aja ada guru yang belum mendapatkan sosialisasi .

3. Tahap aplikasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SDN 5 semabak belum optimal dikarenakan :

- a. Dalam penerapan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dari kepala sekolah dan juga gru SDN 5 semabak namun hasil yang diperoleh sejauh ini pelayanan pembinaan dan sosialisasi dalam pelaksanaan masih belum efektif yang dilihat dari masih banyak nya melebihi standar dan karena tingkat kesadaran siswa untuk melakukan penrapan proses kebijakan kurikulum 2013 tersebut
- b. Untuk penyediaan sarana dan prasarana belum cukup memadai karena belum adanya dana khusus untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Saran

Dari simpulan yang telah dipaparkan diatas peneliti bermaksud memberikan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan keluarga berencana sebagai berikut:

1. Organisasi

Diharapkan pemerintah daerah kabupaten Landak juga ikut berperan dalam menjalankan proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 dengan cara memberikan segala fasilitas terkait program kebijakan kurikulum 2013 dan dukungan orang tua siswa.

2. Interpretasi

Diperlukan turunan kebijakan seperti peraturan daerah terkait proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 agar dalam pelaksanaannya dengan jelas siapa yang menjadi leading sektor atau yang ditunjukkan sebagai penanggung jawab atas kebijakan tersebut.

3. Aplikasi

Melakukan jadwal pembinaan dan sosialisasi secara rutin 1 bulan sekali dengan waktu dan tanggal yang berbeda.

6.3. Keterbatasan Peneliti

Ada beberapa hal dalam Keterbatasan untuk melakukan penelitian proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SDN 58 Semabak.

1. Kurangnya keterampilan dalam peneliti dalam merangkai kalimat dalam penelitian yang menyebabkan peneliti

mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pemikiran –pemikiran kedalam bentuk tulisan selain itu kurangnya pengalaman peneliti karena masih tergolong baru atau permula dalam melakukan penelitian ilmiah sehingga dalam kelemahan tersebut membuat peneliti mengalami kesulitan dalam melaksanakan wawancara, teknik pengumpulan data dan analisis data.

2. Pada saat dilapangan untuk melakukan wawancara peneliti sedikit kesulitan untuk bertemu dengan beberapa implementor karena lokasi peneliti yang cukup jauh terkadang ketika peneliti ke lokasi implementor tidak ada di tempat.

F.REFERENSI

BUKU-BUKU

Buku:

Abdul Wahab, Solichin. 2008.
Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

Charles O, Jones, David Carr Baird (1991). *Pengantar kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali.

Hamid Patilima. Mei 2011.
Metode Penelitian Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.

Leo Agustino, 2012. *Dasar –
dasar kebijakan publik*. Bandung:
Alfabeta

Prof. Dr. Sugiyono. 2019.
*Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R & D*. Bandung:
Alfabeta

Winarno, Budi. 2012.
*Kebijakan Publik: Teori dan
Proses*. Yogyakarta: Media
Pressindo.

Yunus, Hamsah dan Hedy
Vanni Alam. 2018. *Perencanaan
Pembelajaran Berbasis Kurikulum
2013*. Deepublish Publisher:
Yogyakarta.

Skripsi

Sitti Hardianti. 2017. Judul
Penelitian” Implementasi Kurikulum
2013 Pada Proses Pembelajaran Oleh
Guru Mata Pelajaran Fisika Tingkat
Sman Di Kabupaten Bone.

Sandrasiana 2015. Skripsi Ini
Berjudul” Implementasi Kebijakan
Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah
Dasar (Sd) Di kabupaten Garut.

Unitversitas Padjadgaran/Falkultas
Ilmu Sosial Ilmu
Politik/Administrasi Publik

Sumber Lainnya:

www.kemendikbud.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sisitem Pendidikan
Nasional (SISDIKNAS).

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun
2013 dikatakan standar sarana dan
prasarana.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor 16 Tahun 2008 Tentang
sistem pendidikan didaerah bahwa
dalam rangka pelaksanaan Otonomi
Dearah di bidang pendidikan
sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah.